

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Teori Administrasi dan Administrasi Publik

2.1.1 Konsep Administrasi

Ilmu Administrasi lahir karena dibutuhkan oleh masyarakat, dan lahirnya ilmu ini tidak dengan sendirinya tetapi melalui perjuangan yang cukup lama oleh para pencintanya. Selanjutnya agar ilmu ini dapat berkembang sepanjang masa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ilmu ini memerlukan pembinaan dan pengembangan. Sudah pasti bahwa orang-orang yang menjadi pembina dan pengembang ilmu administrasi ini adalah orang-orang yang telah menspesialisasikan dirinya dalam bidang ilmu administrasi, berikut orang-orang yang membutuhkannya atau masyarakat pada umumnya.

Memang masih ada berbagai masalah yang dihadapi dalam mengembangkan dan membina ilmu administrasi ini, terutama di Indonesia, dimana ilmu administrasi belum lama dikenal baik pada perguruan tinggi maupun pada lembaga-lembaga pendidikan rendah, begitu pula dikalangan masyarakat umum. Pada dasarnya manusia dalam berusaha mencapai sesuatu tujuan selalu menghendaki hasil yang lebih besar, dengan pengorbanan yang lebih kecil atau murah. Hal yang demikian hanya bisa dicapai apabila manusia di dalam usahanya itu menerapkan asas efisiensi. Dengan kata lain ia harus mengadministrasi usahanya sebaik-baiknya agar usahanya itu memberikan hasil yang maksimal

Dalam beberapa dekade terakhir ini masyarakat terus menuntut pelayanan publik yang semakin baik. Masyarakat juga semakin lugas dalam menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kinerja lembaga pelayanan publik yang mereka anggap buruk. Selain itu, tuntutan terhadap penegakan demokrasi juga merupakan isu serius yang tidak dapat diabaikan. Hal-hal yang dikemukakan di atas juga terjadi di Indonesia, dan bergulir semakin kencang terutama setelah era reformasi tahun 1998. Tidak ada pilihan lain bagi setiap pemerintahan di dunia selain merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik. Di Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan reformasi administrasi publik, yang populer dikenal sebagai reformasi birokrasi.

Secara etimologis perkataan Indonesia “Administrasi” yang bahasa Inggrisnya “*Administration*”, berasal dari kata Latin, yaitu : “*Ad + ministrare*” dan “*Administratio*”. *Ad + ministrare* berarti melayani, membantu atau memenuhi. (Gie, 2007:56) Sedangkan *Administratio* berarti pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan.(Atmosudirdjo, 2006:21). Administrasi pada hakekatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang wujudnya: merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menselaraskan, mengendalikan, mengawasi, meyempurnakan dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk ringkasnya kegiatan-kegiatan semacam itu tercakup dalam suatu istilah yaitu yang disebut “menata” atau

“penataan”. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengertian Administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan.

Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroiti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Dari segi bahasa kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta “Polis” (negara kota) dan Pur (kota), masuk kedalam bahasa Latin menjadi *Politea* (negara) dan lahirnya kedalam bahasa Inggris pertengahan *Policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata lain *policy an politics* Istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menyatakan “*what ever government choose to do or not to do*”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya.

Menurut Dunn (2003:12) kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran

yang diinginkan. Definisi ini berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/ kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang fair.

Dari berbagai definisi-definisi yang disampaikan para ahli, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana pendapat Effendi (2009:55) bahwa ciri kebijakan publik adalah:

- 1) Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, kebutuhan dasar oleh pasar, maka tak usah ada kebijakan publik.
- 2) Tindakan otorisasi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan).
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah.

Dalam mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut. Tahap-tahap pengambilan kebijakan ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis (Dunn,2003;72).

2.1.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah

ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan¹. Publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, administrasi publik bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses pembangunan, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga.

Ada beberapa isu atau permasalahan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi publik, antara lain :

- 1) Pelayanan Publik. Administrasi publik sebagai proses administrasi untuk publik, pada hakekatnya adalah memberi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan demokrasi yang mana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dari pemerintah. Dalam masalah ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah/negara memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat.
- 2) Motivasi Pelayanan Publik. Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.

- 3) Mal-Administrasi. Mal-administrasi merupakan kesalahan dalam praktek administrasi. Pembahasan teori administrasi publik juga akan membahas masalah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.
- 4) Etika Administrasi Publik. Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk korupsi menjadi bahasan utama.
- 5) Kinerja dan Efektivitas. Seringkali masalah kinerja dan efektivitas menjadi isu sentral dari administrasi publik. Hal tersebut dipahami karena administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu bagaimana cara kerja (kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).
- 6) Akuntabilitas Publik Administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokoknya. (Dunn,2003;80).

Dalam membuat dan menerapkan kebijakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni:

- 1) Adanya tujuan, yakni adanya sebuah tujuan yang ingin di capai, melalui usaha-usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan.
- 2) Adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.

- 3) Adanya program, yaitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- 4) Adanya keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program yang sudah ada.
- 5) Dampak, yakni pengaruh yang terjadi atau timbul dari suatu program dalam masyarakat (Subarsono, 2005:66).

Langkah – langkah dalam pengambilan kebijakan:

1. Identifikasi Masalah
2. Penentuan Alternatif
3. Pemilihan Alternatif
4. Penerapan Alternatif
5. Evaluasi Kebijakan (Subarsono, 2005;13).

Menurut Finsterbuch dan Motz dalam Subarsono (2005:128) menyatakan bahwa “ada empat jenis evaluasi” yaitu :

- 1) *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
- 2) *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.

- 3) *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
- 4) *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Dari empat macam evaluasi ini peneliti menggunakan evaluasi *single program before-after*. Evaluasi *single program before-after* digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang terjadi setelah dan sebelum kebijakan atau program dilaksanakan. Evaluasi *single program before-after*, yakni dilakukan dengan membandingkan kebijakan program sebelum dan sesudah kebijakan program dilaksanakan. dan dengan menggunakan data periode tertentu dalam kebijakan program untuk mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Tipe evaluasi *single program before-after* ini akan diturunkan peneliti dengan menggunakan beberapa indikator yang akan dibahas pada penelitian ini.

Pentahapan proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun, sebagaimana menurut William Dunn sebagai berikut :

- 1) Tahapan penyusunan agenda digunakan untuk merumuskan masalah, mendefinisikan masalah dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.
- 2) Tahapan formulasi kebijakan, merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi Pemerintah untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah. Dalam tahap ini teknik peramalan dapat dipergunakan untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun

kendalan yang akan terjadi dalam pencapaian di masa mendatang akibat diambilnya suatu alternatif kebijakan.

- 3) Tahapan adopsi kebijakan, merupakan tahapan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam tahap ini suatu rekomendasi diperlukan sebagai upaya untuk memahami biaya manfaat dari berbagai alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya dimasa mendatang.
- 4) Tahapan implementasi kebijakan, merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
- 5) Tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan, dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan (Dunn,2003;72).

2.1.3. Macam-macam Kebijakan Publik

Menurut Wayne (2005:45) Kebijakan atau keputusan dapat dilihat menurut bidang tertentu dimana kebijakan itu di keluarkan, antara lain adalah:

- 1) Kebijakan Publik: Suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum, dan dibutuhkannya sebuah aturan atau intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya. Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.
- 2) Kebijakan Ekonomi : Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

- 3) Kebijakan Pertahanan dan Keamanan : Kebijakan dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari gangguan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- 4) Kebijakan Politik: Keputusan yang dikeluarkan untuk mengatur dan menjalankan tiap-tiap bentuk dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan menurut Dunn (2003;12) yang berfokus pada masalah terdiri dari 2 komponen:

1. Komponen informasi yang paling relevan (*Policy Relevant Information*), terdapat 5 informasi :
 - a) Masalah yang harus diatasi
 - b) Masa depan kebijakan
 - c) Tindakan kebijakan terbaik
 - d) Hasil kebijakan
 - e) Kinerja kebijakan
2. Komponen analisis kebijakan, teknik-teknik untuk menghasilkan informasi Perumusan masalah, prakiraan masa depan yang hendak diciptakan, rekomendasi kebijakan, monitoring dan Evaluasi kebijakan.

Kebijakan yang diperoleh selanjutnya diimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.. Menurut Grindle proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut. Pada dasarnya kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif kebijakan

dalam berbagai segi diperhitungkan, kebijakan yang lebih banyak manfaatnya dibanding kerugiannya itulah biasanya menjadi pilihan kebijakan yang diambil. Pertimbangan Pemerintahan dalam kebijakan menurut Patton dan Sakuicki terhadap suatu kebijakan meliputi sebagai berikut:

1. *Technical Feasibility*, mengukur apakah keluaran (*outcome*) dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, apakah alternative yang dipilih akan jalan dalam konteks? Misalnya, apakah program pembangunan jembatan disuatu tempat kian dapat memecahkan kesulitan trafik ditempat itu? Dalam kaitan dengan kriteria teknis ini, ada dua sub kriteria pokok yang perlu dibahas yaitu *effectiveness* dan *adequacy*.

a) *Effectiveness* menyangkut sampai seberapa jauh suatu kebijakan atau program akan mencapai apayang diinginkan. Kriterium ini dapat diukur dalam jangka panjang atau pendek, langsung atau tidak langsung, secara kuantitatif atau tidak, dan pantas atau tidak (*adequate or inadequate*).

b) *Kriterium adequacy* mempersoalkan sampai seberapa jauh kebijakan atau program yang disarankan akan mampu memecahkan persoalan, apakah memecahkan persoalan secara keseluruhan atau hanya sebagian.

2. *Economik and Financial Possibility*. Kriteria ini menyangkut evaluasi ekonomis dari policy atau program yang ada, dan meliputi aspek *change in net work*, *economic affeciency*, *profitability*, dan *cost-effectiveness*.

a) Kriterium "*change in net worrth*" (perubahan dalam nilai) mempersoalkan apakah satu program dapat merubah kemampuan ekonomis khususnya dalam assets dan liabilities seperti perubahan dalam GDP (*gros regional product*), human

capital (tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan), dan *non human resources* (hasil hutan, tambang, dsb).

b) Kriteria "economic efficiency" mempersoalkan apakah dengan menggunakan sumberdaya yang ada telah diperoleh manfaat yang lebih tinggi.

c) *Profitability*, mempertanyakan apakah perbandingan antara pengeluaran proyek dan pemasukan dari proyek tersebut menguntungkan atau tidak, khususnya dalam konteks keuangan (misalnya, *cost-revenue analysis*).

d) *Cost-effectiveness* adalah kriteria yang menyangkut apakah tujuan yang dicapai dengan cost yang minim.

3. *Political Viability*. Kriteria politik menyangkut lima sub kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu *acceptability, appropriateness, responsiveness, legal dan equity*.

a) *Acceptability* menyangkut pertumbuhan apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat.

b) *Appropriateness* berkenaan dengan suatu alternatif kebijaksanaan tidak merusak atau bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat.

c) *Responsiveness* berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijaksanaan, akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. (mungkin suatu policy yang dipilih bersifat efficient dan effective, tetapi dilihat persepsi masyarakat, tidak memenuhi kebutuhan mereka)

d) Legal artinya apakah suatu alternatif kebijaksanaan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e) Equity yaitu apakah suatu alternatif kebijaksanaan akan mempromosi pemerataan dan keadilan dalam masyarakat (mungkin suatu policy dapat meredistribusikan income, memberikan hak untuk memperoleh pelayanan minimum, atau membayarsuatu pelayanan sesuai dengan kemampuan). Kriteria ini dapat diterapkan antar lokasi pemukiman, kelas income, suku dan etnik, umur, seks, status keluarga, status pemilikan rumah, dan antar generasi.

4. *Administrative Operability*. Kriteria spesifik dalam *administrative operability* adalah *authority, institutional comitment, capability dan organitazional support*.

a. *Authority* berkenaan dengan kewenangan mengimplementasi suatu policy atau program. Dengan kata lain, apakah organisasi yang disertai tugas mengimplementasi program memiliki otoritas yang jelas untuk melakukan kerja sama dengan unit organisasi yang lain dalam menentukan prioritas

b. *Institutional commitment* menyangkut komitmen dari *administratorlevel* atas dan bawah, kantor dan pekerja lapangan. Kriteria ini penting untuk menilai apakah suatu alternatif kebijakan bersifat realistis atau tidak.

c. *Capability* berkenaan dengan apakah organisasi yang akan mengimplementasikannya dinilai mampu dalam konteks skills dari staf dan konteks financial.

d. *Organizational support* berkaitan dengan tersedia tidaknya dukungan-dukungan peralatan, fasilitas fisik dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut sebagai berikut (Dunn,2003:78):

- 1) Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- 2) Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran tujuan dan target.
- 3) Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

2.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

2.2.1. Konsep Organisasi

Studi Organisasi adalah studi mengenai cara orang memandang obyek-obyek, juga studi mengenai obyek-obyek itu sendiri. (Pace dan Faules, 2001:2). Banyak pemikiran dari para ahli yang membahas mengenai organisasi, salah satunya adalah definisi yang ditulis oleh Oliver Sheldon yang menyatakan bahwa organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang perlu dilakukan untuk melakukan tugastugas, sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk melakukan pemakaian yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Hal serupa juga dikemukakan oleh Banard (2008:90), yaitu organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak terwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu padu bekerja untuk suatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan bersama dengan alat-alat

yang tepat. Sedangkan Sutarto (2001:40) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, organisasi adalah sistem saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif didefinisikan dan bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan, definisi ini dikemukakan oleh Robbins (2007: 6).

Dalam buku “Komunikasi Organisasi” milik R. Wayne Pace dan F. Faules dikatakan bahwa suatu organisasi, merupakan sebuah wadah yang menampung orang-orang dan obyek-obyek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama. Bila organisasi sehat, bagian-bagian yang interdependen bekerja dengan cara yang sistematis untuk memperoleh hasil yang diinginkan. (Pace dan Faules, 2001:17).

Secara harfiah, organisasi berarti perpindahan dan bagian-bagian yang satu sama lain saling tergantung. Barnard (2008:92) mendefinisikan organisasi sebagai sistem dari kegiatan manusia yang bekerjasama. Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat beberapa hakikat organisasi, yaitu:

- 1) Organisasi merupakan sebuah sistem yang stabil atau baik dari segi hukum maupun sosial. Pada dasarnya sistem suatu organisasi didalamnya terdapat jaringan-jaringan hubungan yang diperpanjang sebagai sebuah sistem sosial.
- 2) Organisasi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, artinya setiap orang dalam organisasi harus berpartisipasi. Partisipasi sangat erat kaitannya dengan kerjasama, adapun pengertiannya adalah keterlibatan spontan yang disertai kesadaran tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk

mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan dari individu-individu yang didalamnya terdapat jaringan-jaringan hubungan yang dipandang sebagai suatu sistem yang saling melengkapi kebutuhan satu sama lain sehingga tercapainya tujuan bersama.

2.2.2. Konsep Organisasi Publik

Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (publik goods), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu (Syafri, 2012:89). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum

Ciri-ciri organisasi publik menurut Robbins (2007: 12) adalah sebagai berikut :

- 1) Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu
- 2) Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
- 3) Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam

- 4) Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada
- 5) Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar
- 6) Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar
- 7) Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas
- 8) Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan
- 9) Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik
- 10) Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

2.3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

2.3.1. Konsep Manajemen

Secara etimologis kata manajemen\ berasal dari bahasa Perancis Kuno ménagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi

yang telah ditetapkan.

Gulick dalam Wijayanti (2008:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Schein (2001:2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. Hasibuan (2008:19) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah

manajemen baik untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenar-benarnya. Banyak defenisi yang dapat digunakan untuk mendefenisikan sumber daya manusia. Menurut Sustarto (2001:3) "sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya".

"Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan", sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich (Mathis dan Jackson,2003:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan.

Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. Disebabkan perubahan kependudukan tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia harus memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang bervariasi. Ditambahkan, praktisi sumber daya manusia haruslah orang-orang yang meyakinkan semua tenaga kerja tanpa melihat latar belakang mereka, menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas mereka "sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2003:29). Begitu juga dengan pemerintahan, apabila di dalamnya

terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut berjaya. Bagi perekonomian negara, kejayaan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik. Oleh karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis.

Manajemen sumber daya manusia merupakan pengelolaan orang didalam organisasi secara optimal agar kinerja organisasi pun seperti yang diharapkan. Asumsi yang lahir dari manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karsa. Semua potensi ini mempengaruhi upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Bagaimana bagusnya rumusan tujuan dan rencana organisasi, maka akan sia – sia jika unsur sumber daya manusia tidak dikelola secara profesional. Ada beberapa definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia. Menurut Stoner (2002:20) “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”.

Menurut Handoko (2012:47) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya kesinambungan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara

produktif dan wajar. Menurut Mathis dan Jackson (2003:4) “manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi.

Dari pengertian – pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap kinerja organisasi.

Proses manajemen sumberdaya manusia menekankan pada:

- 1) Perencanaan Sumber Daya Manusia
- 2) Perekrutan Sumber Daya Manusia
- 3) Seleksi Sumber Daya Manusia
- 4) Sosialisasi atau Orientasi
- 5) Penilaian Prestasi
- 6) Pelatihan dan Pengembangan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijaksanaan organisasi untuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Manajemen sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan efektivitas perusahaan melalui kebijaksanaan, prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola orang orang dalam organisasi tersebut. Menurut Martoyo (1992:84) Setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya tujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif

dan efisien. Efisiensi maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik dan buruknya pengembangan sumber daya manusia/anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut secara proporsional harus diberikan pendidikan dan latihan yang sebaik – baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin.

2.3.2. Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- 1) Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
- 2) Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- 3) Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas

mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

- 4) Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
- 5) Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- 6) Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
- 7) Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang (Mahmudi, 2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu:

1. Fungsi strategi, meliputi:
 - a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
 - b) membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
 - a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
 - b) pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
 - c) pengendalian kinerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
 - a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
 - b) Hubungan dengan organisasi lain;
 - c) Hubungan dengan pers dan publik.

Konsep manajemen publik dalam penelitian ini dipaparkan dalam 3 paradigma, yaitu sebagai berikut:

- a. Old Public Administration.
- b. New Public Management
- c. New Public Service

Dari paradigma-paradigma di atas, telah dikemukakan perubahan konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut Islamy (2003:56) manajemen publik memiliki karakter antara lain:

- a. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada

lembagalembaga publik;

- b. manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (nonprofit sector);
- c. manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
- d. manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (internal operations) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;
- e. manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (organizational how to) publik melaksanakan kebijakan publik;
- f. manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada the managerial tools, techniques, knowledges and skills yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

2.4. Konsep Perencanaan Program

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen atau pengelolaan termasuk pengelolaan komunikasi, baik ditinjau dari segi proses, bentuk maupun komponen-komponen atau unsur-unsur. Dari sudut proses, pengelolaan mencakup unsur-unsur dalam manajemen, baik secara lengkap maupun secara sederhana. Secara lengkap unsur-unsur tersebut terdiri dari penelitian pengembangan (litbang); perencanaan; pengorganisasian; pelaksanaan/ pengkomunikasian; monitoring/pengawasan; dan penilaian. Secara singkat unsur tersebut dikenal dengan

POAC (*Planning Organizing, Actuating dan Controlling*). Setiap unsur harus mampu didefinisikan baik secara logis maupun akademis. Dari masing-masing definisi setiap unsur/komponen tidak boleh tumpang tindih. Proses pengelolaan, bisa berbentuk lingkaran (*cycle*) termasuk proses komunikasi. Dari sudut objek, perencanaan memerlukan faktor-faktor untuk pelaksanaannya, yaitu man, money, material, dan method untuk mencapai tujuan. Di samping faktor proses dan objek juga harus diperhatikan komponen-komponen dalam proses komunikasi, seperti komunikator, pesan, media, komunikan, efek, feed back, tujuan, dan lingkungan yang turut mempengaruhinya..

Menurut Siagian (2010:90) Perencanaan adalah suatu proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian perencanaan mempunyai banyak macamnya, akan tetapi yang menurutnya dianggap penting antara lain dikemukakan oleh:

- 1) Billy E. Goetz, yang mengemukakan bahwa Perencanaan adalah kemampuan untuk memilih dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan.
- 2) Drucker, mengemukakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses kerja yang terus menerus yang meliputi pengambilan keputusan yang bersifat pokok dan penting dan yang akan dilaksanakan secara sistematis, melakukan perkiraan-perkiraan dengan mempergunakan segala pengetahuan yang ada tentang masa depan, mengorganisir secara sistematis segala upaya yang dipandang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan, serta mengukur keberhasilan dari pelaksanaan

keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap target yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan umpan balik yang diterima dan yang telah disusun secara teratur dan baik.

- 3) Sedangkan menurut Levey dan Loomba, Perencanaan adalah suatu proses menganalisis dan memahami sistem yang dianut, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menganalisis efektivitas dari berbagai kemungkinan tersebut, menyusun perincian selengkapnya dari kemungkinan yang terpilih, serta mengikatnya dalam suatu sistem pengawasan yang terus menerus sehingga dapat dicapai hubungan yang optimal antara rencana yang dihasilkan dengan sistem yang dianut. (Azwar,2006:122).

Adapun tujuan perencanaan menurut Azwar (2006:125), antara lain:

- 1) Membantu para pelaksana dalam melaksanakan program dengan perencanaan yang baik maka setiap pelaksana akan memahami rencana tersebut dan akan merangsang para pelaksana untuk dapat melakukan beban tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- 2) Membantu para pelaksana untuk membuat perencanaan pada masa depan, jadi hasil yang diperoleh dari suatu pekerjaan perencanaan pada saat ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja pada masa depan dan demikian seterusnya.
- 3) Sebagai upaya pengaturan baik dalam bidang waktu, tenaga pelaksana, sarana, biaya, tujuan, lokasi serta macam organisasi pelaksanaannya. Jadi dengan

perencanaan yang baik akan menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi, bentrokan ataupun penghamburan dan penyalahgunaan dari setiap program kerja ataupun aktivitas yang dilakukan, jadi pemanfaatan dari sumber data dan tata cara yang dipunyai dapat diatur secara lebih efisien dan efektif.

- 4) Untuk memperoleh dukungan baik berupa dukungan legislatif (melalui peraturan ataupun perundang-undangan), dapat berupa dukungan moril (persetujuan masyarakat, ataupun dukungan materiil dan finansial (biasanya dari para sponsor).

Ciri-ciri Perencanaan Menurut Levey dan Loomba di dalam Azwar (2006:125), suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Perencanaan harus mempunyai tujuan yang jelas.
- 2) Perencanaan harus mengandung uraian yang lengkap tentang segala aktivitas yang akan dilaksanakan, yang dibedakan pula atas aktivitas pokok serta aktivitas tambahan.
- 3) Perencanaan harus dapat menguraikan pula jangka waktu pelaksanaan setiap aktivitas ataupun keseluruhan aktivitas yang akan dilaksanakan. Suatu rencana yang baik, hendaknya berorientasi pada masa depan bukan sebaliknya.
- 4) Perencanaan harus dapat menguraikan macam organisasi yang dipandang tepat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah disusun. Dalam organisasi tersebut harus dijelaskan pula pembagian tugas masing-masing bagian atau individu.

- 5) Perencanaan harus mencantumkan segala hal yang dipandang perlu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah disusun, seperti macam tenaga pelaksanaannya, besarnya dana dan sumber dana yang diperkirakan ada.
- 6) Perencanaan harus mempertimbangkan segala faktor yang mempengaruhi atau diperkirakan mempengaruhi rencana tersebut, sehingga menjadi jelas apakah rencana tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.
- 7) Perencanaan dibuat dengan berpedoman pada sistem yang dimiliki dan orientasi penyusunannya pada keseluruhan sistem tersebut, bukan terhadap masing-masing individu pelaksanaannya.
- 8) Perencanaan harus memiliki unsur fleksibilitas artinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, sedemikian rupa sehingga pemanfaatan sumber dan tata cara dapat diatur dengan baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 9) Perencanaan harus mencantumkan dengan jelas standar yang dipakai untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan yang akan terjadi. Jadi suatu rencana dapat menguraikan pula mekanisme kontrol yang akan dipergunakan.
- 10) Perencanaan harus dilaksanakan terus-menerus, artinya hasil yang diperoleh dari perencanaan yang sedang dilakukan, dapat dipakai sebagai pedoman untuk perencanaan selanjutnya.

Adapun untuk mengukur perencanaan dapat berjalan dengan baik, maka dapat diukur dari:

- 1) Berdasarkan pada alternative.

Agar dapat menetapkan perencanaan yang baik maka sebelumnya agar disusun berbagai alternative, misalnya untung dan rugi kelebihan dan kekurangannya,

kendala dan dukungannya, sehingga dapat menentukan perencanaan yang paling baik.

2) Harus realistis.

Bila perencanaan tidak realistis, mungkin baik diatas kertas saja akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam prakteknya. Misalnya : keterbatasan dalam teknologi, keterbatasan sumber dana, tenaga kerja.

3) Harus ekonomis.

Disamping keterbatasan diatas, juga harus mempertimbangkan tingkat ekonomis dalam suatu rencana. Hindarkan faktor pemborosan, biaya, waktu, tempat.

4) Harus fleksibel.

Dalam hal ini perencanaan harus fleksibel, artinya setiap saat dapat dievaluir sesuai dengan perkembangan organisasi, situasi dan kondisi pada waktu tersebut. Pada dasarnya perencanaan itu disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, namun dalam prakteknya sering terjadi berbagai penyimpangan yang tidak dapat dihindarkan.

5) Didasari partisipasi.

Dalam pembuatan perencanaan hendaknya dapat diikuti berbagai pihak untuk memperoleh masukan (input) agar lebih sempurna. Dengan adanya partisipasi, perusahaan akan memperoleh manfaat ganda, karena disamping rencana menjadi lebih baik, juga dapat menambah semangat kerja para karyawan (Anwar, 2013: 65)

Menurut Azwar (2006:130), jika dilihat dari jangka waktu berlakunya perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Perencanaan jangka panjang (*Long-range planning*) Disebut perencanaan jangka panjang, jika masa berlakunya rencana tersebut antara 12 sampai 20 tahun.
- 2) Perencanaan jangka menengah (*Medium-range planning*) Disebut perencanaan jangka menengah, jika masa berlakunya rencana tersebut antara 5 sampai 7 tahun.
- 3) Perencanaan jangka pendek (*Short-range planning*) Disebut perencanaan jangka pendek, jika masa berlakunya rencana tersebut hanya untuk jangka waktu 1 tahun saja.

2.5. Konsep Perguruan Tinggi

2.5.1. Pengertian Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (Syamsudin, 2010:32)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi merupakan suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setingginya melalui jalur pendidikan sekolah.(Dardjowidjojo, 2010: 42).

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya. Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang

dan program studi yang ditawarkan seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. (Sudjana, 2010:54)

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia terdiri dari tiga kategori, yaitu: Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), Lembaga pendidikan tersebut berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi. Terdiri dari Strata satu (S1) bergelar Sarjana, Diploma I dan II bergelar A.Ma, Diploma III bergelar A.Md, Starata dua atau pasca sarjana (S2) bergelar Magister, dan Strata tiga (S3) bergelar Doktor (DR).(Ndraha,2010:39).

Hakikat perguruan tinggi yaitu sebagai proses belajar mengajar adalah berusaha mencari informasi dan pengetahuan serta mengajar. Perguruan tinggi sebagai proses belajar mengajar yang berarti berusaha memperoleh pengetahuan dan prilaku yang benar tentang sesuatu dari lingkungannya. Sedangkan mengajar adalah mengkomunikasikan pengetahuan dan prilaku tadi kepada orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain mampu mengembangkan lebih lanjut. (Hamalik, 2010:90).

Pendidikan tinggi dapat diterapkan dalam beberapa bentuk: reguler atau tatap muka dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan reguler diterapkan dengan menggunakan komunikasi langsung diantara dosen dan mahasiswa, sedangkan pendidikan jarak jauh dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis media komunikasi seperti surat menyurat, radio, audio/video, televisi, dan jaringan computer. Baik pendidikan reguler maupun pendidikan jarak jauh memulai aktivitas akademis atau jadwal akademik pada bulan September setiap tahunnya. Satu tahun akademik terbagi atas minimal dua semester yang terdiri dari setidaknya 16 minggu. Institusi pendidikan tinggi juga dapat melangsungkan semester pendek diantara dua semester reguler. Penerimaan

mahasiswa pada perguruan tinggi didasarkan atas beberapa persyaratan dan prosedur serta objek penyeleksian yang tidak diskriminatif. Hal tersebut diatur oleh Senat masing-masing institusi pendidikan tinggi. Penerimaan mahasiswa merupakan tanggung jawab dari masing-masing perguruan tinggi. Calon mahasiswa D1,D2,D3,D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk. (Hayat, 2010:90).

Perguruan Tinggi merupakan pendekatan Mikro dan Makro, pendekatan mikro yaitu tinjauan terhadap proses belajar mengajar yang terjadi di dalam lembaga, sedangkan pendekatan makro tinjauan terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung antara lembaga dengan lingkungannya. Sedangkan Perguruan Tinggi sebagai komunitas ilmiah, yakni Perguruan Tinggi adalah komunitas ilmiah atau komunitas pelajar . Jadi perguruan tinggi sebagai komunitas dapat berfungsi mentranspormasi dan melestarikan system nilai, tata cara dan pengetahuan. Perguruan tinggi juga didukung dan diberi tugas menyelenggarakan program tetap yang disebut kurikulum. (Ndraha,2010:42)

Dari penjelasan diatas maka perguruan tinggi merupakan gejala kota, yang identik dengan kemodrnan dan lebih menenkankan pendekatan yang bersifat liberal. Peranan perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dipandang potensial dan sangat menentukan. Masalah yang perlu dicermati adalah sudah sejauh mana perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas,

mandiri, dan profesional pada bidang yang ditekuni. membicarakan lulusan yang mandiri dan profesional adalah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dalam hal bagaimana mengolah dan memanfaatkan program dan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kemahasiswaan secara optimal. (Mulyana, 2011:76)

2.5.2. Perencanaan Pada Perguruan Tinggi

Pengertian perencanaan (*planning*) adalah proses dasar (fundamen) dan suatu fungsi utama dari manajemen dalam hal memberikan kepada organisasi, cara memutuskan suatu tujuan yang akan dicapai dalam menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. (Husein, 2014:122)

Perencanaan sering dihubungkan dengan masalah memilih. Artinya kita memilih tujuan dan cara terbaik, untuk mencapai tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif perencanaan tidak ada. Pandangan lain mengatakan, perencanaan disebut sebagai kumpulan daripada keputusan-keputusan yang telah disepakati, karena di dalamnya mengandung beberapa peraturan dalam penggunaan : waktu, sumber daya yang dimiliki, dan upaya untuk mewujudkan apa yang ingin kita capai, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena rencana adalah dasar pengendalian. (Siagian, 2010:93)

Aspek terpenting dalam perencanaan termasuk perencanaan pendidikan adalah pembuatan keputusan. (*decision making*). Keputusan-keputusan harus dibuat pada setiap bagian proses perencanaan, dimana menurut Anwar (2013:89), setiap kegiatan perencanaan yang baik harus melalui:

- 1) Menentukan tujuan

Dengan adanya tujuan yang jelas dan terarah dari suatu lembaga atau organisasi, maka sumber daya yang akan dipergunakan menjadi efektif dan efisien.

2) Merumuskan keadaan sekarang

Oleh karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu mendatang, para pengambil keputusan harus memahami lebih dahulu posisi lembaga atau organisasi pada saat ini. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dipakai sebagai dasar proyeksi ke depan.

3). Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan

Pada tahap ini perlu diidentifikasi semua kekuatan dan semua kelemahan yang ada di lembaga atau organisasi, ini sebagai ukuran atas kemampuan lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan. Sebagai kemudahan dan hambatan yang berasal dari dalam sendiri maupun dari luar lembaga, hal ini dilakukan agar pada suatu saat bila ada hambatan akan mudah di atasi.

4). Mengembangkan serangkaian kegiatan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam perencanaan, karena itu langkah yang perlu dilakukan adalah;

- a. Menyusun berbagai alternatif tindakan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan.
- b. Alternatif tersebut dinilai dan dibandingkan
- c. Setelah itu dipilih salah satu alternatif yang terbaik.

Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah untuk melihat apakah semua program yang telah disusun dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan lain pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang akan datang, yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik. Atas dasar ini pula maka tujuan perencanaan adalah :

- 1) Dapat membantu para manajer menyeleksi alternatif-alteratif tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, program dan prosedur.
- 2) Sebagai suatu landasan untuk mengendalikan, atau alat kontrol.
- 3) Memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai seluruh pekerjaan.
- 4) Sebagai alat untuk membantu penggunaan alat pengukuran hasil kerja.
- 5) Merupakan pekerjaan membuat hal-hal terjadi sebagaimana dikehendaki.
- 6) Perencanaan pada dasarnya adalah proses pemikiran, penentuan tindakan-tindakan secara sadar berdasarkan keputusan-keputusan menyangkut tujuan, fakta dan ramalan-ramalan.
- 7) Seluruh kegiatan dalam organisasi dilakukan secara teratur dan bertujuan.
- 8) Dengan perencanaan dapat memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
- 9) Dengan perencanaan membuat semua tindakan menjadi ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik pada tujuan.
- 10) Perencanaan pada dasarnya adalah memilih dan persoalan dan timbul bilamana alternatif cara bertindak ditemukan. (Siagian, 2010:110)

2.6. Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi manajemen yang paling utama adalah Perencanaan karena dari fungsi tersebutlah fungsi-fungsi lain disusun. Perencanaan merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan yang memuat pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan terkait dengan pencapaian tujuan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa sebuah rencana merupakan jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara masa kini dengan masa datang yang diinginkan, karena perencanaan adalah mempersiapkan masa depan. Masa depan memang akan datang dengan sendirinya, tapi tanpa perencanaan masa depan tersebut mungkin bukan masa depan yang kita inginkan.

Menurut Siagian (2010:90) Perencanaan adalah suatu proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek terpenting dalam perencanaan termasuk perencanaan pendidikan adalah pembuatan keputusan. (*decision making*). Keputusan-keputusan harus dibuat pada setiap bagian proses perencanaan, dimana menurut Anwar (2013:89), setiap kegiatan perencanaan yang baik dan efektif harus melalui:

1) Menentukan tujuan

Dengan adanya tujuan yang jelas dan terarah dari suatu lembaga atau organisasi, maka sumber daya yang akan dipergunakan menjadi efektif dan efisien.

2) Merumuskan keadaan sekarang

Oleh karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu mendatang, para pengambil keputusan harus memahami lebih dahulu posisi lembaga atau organisasi pada saat ini. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dipakai sebagai dasar proyeksi ke depan.

3). Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan

Pada tahap ini perlu diidentifikasi semua kekuatan dan semua kelemahan yang ada di lembaga atau organisasi, ini sebagai ukuran atas kemampuan lembaga atau

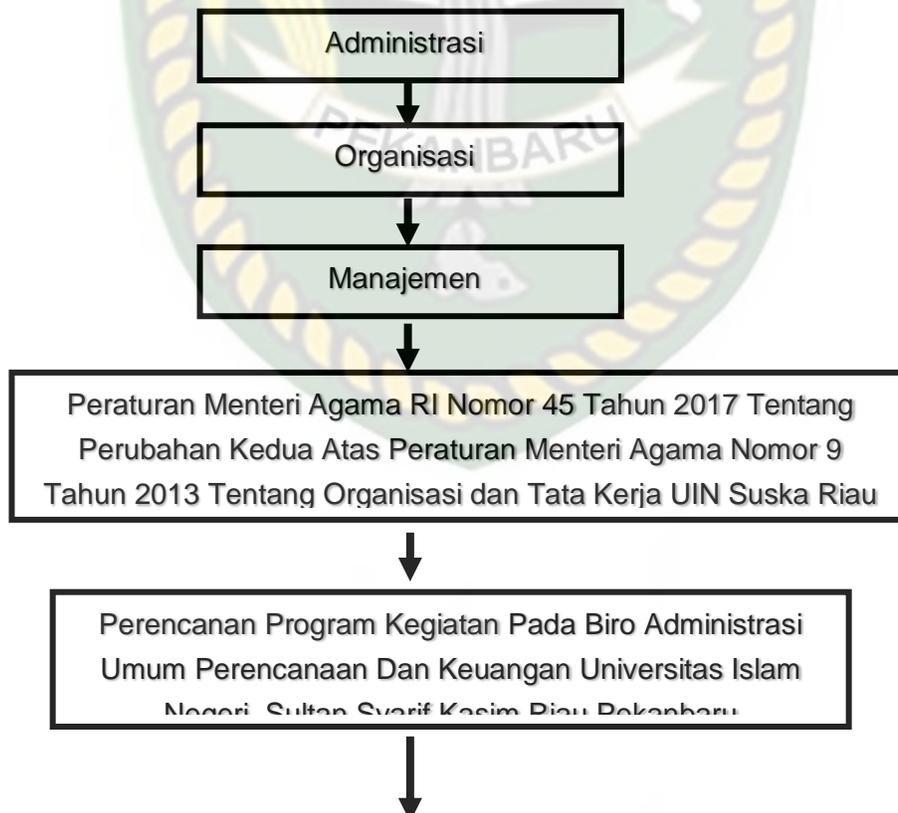
organisasi dalam mencapai tujuan. Sebagai kemudahan dan hambatan yang berasal dari dalam sendiri maupun dari luar lembaga, hal ini dilaukan agar pada suatu saat bila ada hambatan akan mudah di atasi.

4). Mengembangkan serangkaian kegiatan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam perencanaan, karena itu langkah yang perlu dilakukan adalah;

- a. Menyusun berbagai alternatif tindakan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan.
- b. Alternatif tersebut dinilai dan dibandingkan
- c. Setelah itu dipilih salah satu alternatif yang terbaik.

Untuk lebih jelas bagaimana gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:



PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN

- 1) Menentukan tujuan
- 2) Merumuskan keadaan sekarang
- 3) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan
- 4) Mengembangkan serangkaian kegiatan

(Anwar, 2013:89)

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2018

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang diteliti (*state of the art*) berhasil dihimpun oleh penulis sekaligus menjadi acuan dalam butir-butir pertanyaan yang nantinya disebarkan kepada responden.

- 1) Penelitian Nick Albertho (2013) dengan judul “Proses Perencanaan Program Upaya Kesehatan Wajib (Basic Six) Pada Puskesmas Di Kabupaten Keerom Propinsi Papua”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan yang dilaksanakan pada program upaya kesehatan wajib (basic six) di Puskesmas Kabupaten Keerom. Penelitian ini dilaksanakan di empat puskesmas yang mewakili dua daerah DTPK dan dua daerah non DTPK di Kabupaten Keerom menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan program Basic six di Puskesmas yang ada di Kabupaten Keerom telah sesuai dengan tahapan dan petunjuk teknis proses perencanaan yang diberikan. Tahapan proses perencanaan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis situasi dilakukan dengan mempertimbangkan masalah kesehatan, kinerja program, dan faktor resiko

lingkungan. Penentuan prioritas masalah dijalankan pada setiap puskesmas, penentuan tujuan mengikuti Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Identifikasi masalah tidak dilakukan di semua puskesmas, dan rencana operasional dirumuskan melibatkan seluruh komponen puskesmas dan dirumuskan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Perbandingan yang dilakukan terhadap proses perencanaan masing-masing puskesmas memperlihatkan perbedaan hanya terletak pada keterlibatan komponen puskesmas dalam proses perencanaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang proses perencanaan kegiatan serta bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan yang dilaksanakan. Kemudian penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah diantaranya, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu terletak kepada substansi masing-masing masalah penelitian yang dihadapi, lokasi tempat dilaksanakannya penelitian dan periode waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

- 2) Penelitian Rahmat Hidayat (2014) dengan judul “Perencanaan Kegiatan Maintenance Dengan Metode Reability Centered Maintenance II. Penelitian ini membahas perencanaan kegiatan maintenance dengan metode reability centered maintenance (RCM) II untuk menilai risiko kerusakan fungsi pada compresor screw. Perhitungan waktu maintenance optimal dilakukan dengan memperhatikan biaya maintenance dan biaya perbaikan. Hasil penilaian risiko dengan risk priority number

(RPN) menunjukkan bahwa komponen kritis yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam memberikan maintenance pada compresor screw adalah kerusakan fungsi pada piston yang aus, dan pada spon filter udara keluar rusak yang mendapatkan RPN 45. Penentuan waktu maintenance optimal diberikan pada komponen yang mengalami scheduled restoration dan scheduled discard task agar tindakan tersebut menjadi technically feasible untuk menurunkan konsekuensi kerusakan. Nilai waktu maintenance optimal yang diperoleh untuk mencegah kerusakan pada compresor screw lebih kecil dari nilai mean time to failure (MTTF) yang menunjukkan bahwa waktu maintenance optimal akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerusakan fungsi komponen sebelum kerusakan terjadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang proses perencanaan kegiatan serta bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan yang dilaksanakan. Kemudian penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah diantaranya, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu terletak kepada substansi masing-masing masalah penelitian yang dihadapi, lokasi tempat dilaksanakannya penelitian dan periode waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

- 3) Penelitian Budi Sentoso (2014) dengan judul “Sistem Penganggaran Pendidikan Tinggi Dari Old Public Management Menuju New Public Management”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem penganggaran pada Pendidikan Tinggi Dari Old Public Management Menuju New Public Management.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada salah satu perguruan tinggi BLU dibawah kementerian agama menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara konsisten: 1. Renstra universitas belum dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran, bahkan indikator kinerja yang semestinya diwujudkan dalam sebuah kontrak kinerja juga belum ada. Padahal keharusan adanya penetapan kinerja ini telah diperintahkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang pentingnya penetapan kinerja, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah/PAN Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2. Belum ada evaluasi dan penghitungan terhadap perkembangan penerimaan dan belanja APBN setelah 5 (lima) tahun menerapkan BLU, sektor apa yang memberikan sumbangan yang besar atau yang kurang berkontribusi setelah penerapan BLU belum diketahui, bahkan ada kecenderungan penerimaan BLU semakin menurun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang proses perencanaan kegiatan serta bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan yang dilaksanakan. Kemudian penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah diantaranya, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu terletak kepada substansi masing-masing masalah penelitian yang dihadapi, lokasi tempat

dilaksanakannya penelitian dan periode waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

- 4) Penelitian Welly Wirman (2015) dengan judul “Analisis Perencanaan Program Corporate Social Responsibility PT. Perkebunan Nusantara V Di Pekanbaru (Studi tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN V)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tahap-tahap perencanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara V. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Pekanbaru Riau, telah melakukan atau melaksanakan perencanaan program PKBL dengan cukup baik, namun demikian masih ada tahapan-tahapan perencanaan program yang perlu dilengkapi atau disempurnakan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. PT Perkebunan Nusantara V belum melaksanakan perencanaan komunikasi secara khusus karena hasil lapangan belum menunjukkan secara jelas adanya perencanaan terkait sumberdaya komunikasi seperti perencanaan terhadap sumber, pesan, media dan khalayak serta efeknya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang proses perencanaan kegiatan serta bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan yang dilaksanakan. Kemudian penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah diantaranya, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu terletak kepada substansi masing-masing masalah penelitian yang dihadapi, lokasi tempat

dilaksanakannya penelitian dan periode waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Nick Albertho (2013)	Proses Perencanaan Program Upaya Kesehatan Wajib (<i>Basic Six</i>) Pada Puskesmas Di Kabupaten Keerom Propinsi Papua	Perencanaan Program	Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan program Basic six di Puskesmas yang ada di Kabupaten Keerom telah sesuai dengan tahapan dan petunjuk teknis proses perencanaan yang diberikan. Tahapan proses perencanaan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis situasi dilakukan dengan mempertimbangkan masalah kesehatan, kinerja program, dan faktor resiko lingkungan. Penentuan prioritas masalah dijalankan pada setiap puskesmas, penentuan tujuan mengikuti Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Identifikasi masalah tidak dilakukan di semua puskesmas, dan rencana operasional dirumuskan melibatkan seluruh komponen puskesmas dan dirumuskan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Perbandingan yang dilakukan terhadap proses perencanaan masing-masing puskesmas memperlihatkan perbedaan hanya terletak pada keterlibatan komponen puskesmas dalam proses perencanaan.

1	2	3	4	5
2.	Rahmat Hidayat (2014)	Perencanaan Kegiatan Maintenance Dengan Metode Reability Centered Maintenance II	Perencanaan Kegiatan	Hasil penilaian risiko dengan risk priority number (RPN) menunjukkan bahwa komponen kritis yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam memberikan maintenance pada compresor screw adalah kerusakan fungsi pada piston yang aus, dan pada spon filter udara keluar rusak yang mendapatkan RPN 45. Penentuan waktu maintenance optimal diberikan pada komponen yang mengalami scheduled restoration dan scheduled discard task agar tindakan tersebut menjadi technically feasible untuk menurunkan konsekuensi kerusakan. Nilai waktu maintenance optimal yang diperoleh untuk mencegah kerusakan pada compresor screw lebih kecil dari nilai mean time to failure (MTTF) yang menunjukkan bahwa waktu maintenance optimal akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerusakan fungsi komponen sebelum kerusakan terjadi.
3.	Budi Sentoso (2014)	Sistem Penganggaran Pendidikan Tinggi	Sistim Penggaran Kegiatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada salah satu perguruan tinggi BLU dibawah kementerian agama menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem

		Dari Old Public Management Menuju New Public Management		<p>penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara konsisten: 1. Renstra universitas belum dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran, bahkan indikator kinerja yang semestinya diwujudkan dalam sebuah kontrak kinerja juga belum ada. Padahal keharusan adanya penetapan kinerja ini telah diperintahkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang pentingnya penetapan kinerja, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah/PAN Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2. Belum ada evaluasi dan penghitungan terhadap perkembangan penerimaan dan belanja APBN setelah 5 (lima) tahun menerapkan BLU, sektor apa yang memberikan sumbangan yang besar atau yang kurang berkontribusi setelah penerapan BLU belum diketahui, bahkan ada kecenderungan penerimaan BLU semakin menuru</p>
4.	Welly Wirman (2015)	Analisis Perencanaan Program Corporate Social Responsibility PT. Perkebunan Nusantara V Di Pekanbaru (Studi tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN V)	Perencanaan Program	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Pekanbaru Riau, telah melakukan atau melaksanakan perencanaan program PKBL dengan cukup baik, namun demikian masih ada tahapan-tahapan perencanaan program yang perlu dilengkapi atau disempurnakan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. PT Perkebunan Nusantara V belum melaksanakan perencanaan komunikasi secara khusus karena hasil lapangan belum menunjukkan secara jelas adanya perencanaan terkait sumberdaya komunikasi seperti perencanaan terhadap sumber, pesan, media dan khalayak serta efeknya.</p>

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2018

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.2. Perbandingan Peneliiian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Nick Albertho (2013)	Proses Perencanaan Program Upaya Kesehatan Wajib (Basic Six) Pada Puskesmas Di Kabupaten Keerom Propinsi Papua	<p>Variabel Penelitian: A. Perencanaan Program Tujuan Penelitian: B. Menganalisis pelaksanaan perencanaan program Metode Penelitian: C. Kualitatif Deskriptif</p>	<p>1. Substansi yang menjadi fenomena masalah 2. Periode Pengamatan Tahun 2017 3. Lokasi Penelitian UIN Suska Riau</p>

2.	Rahmat Hidayat (2014)	Perencanaan Kegiatan Maintenance Dengan Metode Reability Centered Maintenance II	Variabel Penelitian: • Perencanaan Program Tujuan Penelitian: • Menganalisis pelaksanaan perencanaan program Metode Penelitian: • Kualitatif Deskriptif	1. Substansi yang menjadi fenomena masalah 2. Metode Analisa Data: • Reability Centered Maintenance 3. Periode Pengamatan Tahun 2017 4. Lokasi Penelitian UIN Suska Riau
3.	Budi Sentoso (2014)	Sistem Penganggaran Pendidikan Tinggi Dari Old Public Management Menuju New Public Management	Metode Penelitian: • Kualitatif Deskriptif Objek Penelitian Sama Sama Meneliti Penganggaran Pada Perguruan Tinggi	1. Substansi yang menjadi fenomena masalah 2. Variabel Penelitian: • Sistem Penggaran Kegiatan 3. Periode Pengamatan Tahun 2017 4. Lokasi Penelitian UIN Suska Riau
4.	Welly Wirman (2015)	Analisis Perencanaan Program Corporate Social Responsibility PT. Perkebunan Nusantara V Di Pekanbaru (Studi tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN V)	Variabel Penelitian: A. Perencanaan Program Tujuan Penelitian: B. Menganalisis pelaksanaan perencanaan program Metode Penelitian: C. Kualitatif Deskriptif	1. Substansi yang menjadi fenomena masalah 2. Periode Pengamatan Tahun 2017 3. Lokasi Penelitian UIN Suska Riau

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2018

2.8. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

- 2) Perencanaan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Program adalah rangkaian-rangkaian kegiatan atau seperangkat tindakan untuk melaksanakan sebuah kegiatan
- 4) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
- 5) Biro adalah bagian dari instansi yang mengurus suatu urusan
- 6) Administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain.
- 7) Keuangan adalah Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah
- 8) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan organisasi vertikal yang merupakan lembaga perguruan tinggi dibawah Kementrian Agama Republik Indonesia, sebuah organisasi yang melakukan proses pelayanan publik di bidang pendidikan tinggi.

Selanjutnya untuk meneliti analisis perencanaan program kegiatan pada Biro Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Maka aspek terpenting dalam perencanaan termasuk

perencanaan ini adalah pembuatan keputusan. (*decision making*). Keputusan-keputusan harus dibuat pada setiap bagian proses perencanaan, dimana menurut Anawar (2013:89), setiap kegiatan perencanaan yang baik dan efektif harus melalui:

1) Menentukan tujuan

Dengan adanya tujuan yang jelas dan terarah dari suatu lembaga atau organisasi, maka sumber daya yang akan dipergunakan menjadi efektif dan efisien.

2) Merumuskan keadaan sekarang

Oleh karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu mendatang, para pengambil keputusan harus memahami lebih dahulu posisi lembaga atau organisasi pada saat ini. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dipakai sebagai dasar proyeksi ke depan.

3). Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan

Pada tahap ini perlu diidentifikasi semua kekuatan dan semua kelemahan yang ada di lembaga atau organisasi, ini sebagai ukuran atas kemampuan lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan. Sebagai kemudahan dan hambatan yang berasal dari dalam sendiri maupun dari luar lembaga, hal ini dilakukan agar pada suatu saat bila ada hambatan akan mudah di atasi.

4). Mengembangkan serangkaian kegiatan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam perencanaan, karena itu langkah yang perlu dilakukan adalah;

- a) Menyusun berbagai alternatif tindakan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan.
- b) Alternatif tersebut dinilai dan dibandingkan
- c) Setelah itu dipilih salah satu alternatif yang terbaik.

Tabel 2.3. Operasional Variabel Penelitian

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator	Item Penilaian
1.	Perencanaan adalah suatu proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	Perencanaan Program kegiatan	1) Menentukan tujuan	a) Tujuan Jelas dan terarah b) Tujuan efektif dan efisien. c) Tujuan Sesuai Kebutuhan
			2) Merumuskan keadaan sekarang	a) Memahami posisi organisasi saat ini. b) Memahami resiko-resiko yang dihadapi c) Pengumpulan data dan informasi menjadi dasar proyeksi ke depan.
			3) Mengembangkan serangkaian kegiatan	a) Mengidentifikasi semua kekuatan dan kelemahan organisasi. b) Menetapkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan c) Memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah.
			4) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan	a) Menyusun berbagai alternatif tindakan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan. b) Alternatif tersebut dinilai dan dibandingkan c) Setelah itu dipilih salah satu alternatif yang terbaik

Sumber: Anawar (2013:89),



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau